

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Era globalisasi dan pasar bebas, negara-negara di dunia dituntut untuk menerapkan sistem dan paradigma baru dalam pengelolaan bisnis, yaitu kegiatan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*. Selain itu Era globalisasi juga telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam berbagai bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Perubahan kondisi perekonomian global yang terjadi di berbagai negara juga memiliki dampak bagi negara Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya tata kelola yang baik dalam setiap sektor perekonomian di Indonesia.

Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para *shareholders* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya. Hal ini dimaksud pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan dilingkungan tertentu.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam mendefinisikan GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan

antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau system yang mengendalikan perusahaan.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati dkk, 2004).

Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Pada dasarnya munculnya isu *corporate governance* dilatarbelakangi oleh teori keagenan (*theory agency*), yang menyatakan munculnya *agency*, karena pengelolaan suatu perusahaan yang terpisah dari kepemilikan. Dewan komisaris yang berperan sebagai *agent* dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun *agent* tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham (pemilik).

Sedangkan menurut Tjager *et al.*(2003) dalam Purwantini, *agency problem* yang muncul sebagai akibat adanya hubungan antara *agent* dengan pemilik ketika timbul konflik antara harapan dan tujuan pemilik/pemegang saham dan para direksi (*top management*). Para pemilik mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya dikerjakan manajemen dan juga ketika pemilik dan direksi mempunyai sikap yang berbeda terhadap resiko. Menurut Tjager *et al.*(2003) dalam Purwantini dalam bukunya yang berjudul *corporate governance* menyatakan bahwa sentralisasi isu *corporate governance* juga dilatar belakangi beberapa permasalahan diantaranya adanya tuntutan akan transparansi dan independensi itu terlihat adanya tuntutan perusahaan agar memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan–tindakan para eksekutif.

Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian atas investasi yang telah mereka tanamkan. Dengan demikian, hal tersebut akan mengakibatkan aliran masuk modal (*capital inflows*) ke suatu negara mengalami penurunan sedangkan aliran keluar modal (*capital outflows*) dari suatu negara mengalami kenaikan. Akibat selanjutnya adalah menurunnya harga-harga saham di negara tersebut, sehingga pasar modalnya menjadi tidak berkembang dan menurunnya nilai pertukaran mata uang negara tersebut.

Dalam penelitian ini mengkaji tentang mekanisme GCG yaitu mekanisme pemantauan kepemilikan yang meliputi kepemilikan institusional dan kepemilikan

manajerial. Mekanisme pemantauan pengendalian internal meliputi ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan. Mekanisme pemantauan pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan komite audit.

Kepemilikan institusional yang semakin besar akan mengakibatkan control eksternal yang lebih besar di dalam suatu perusahaan yang berdampak penurunan harga saham perusahaan dipasar modal sehingga kepemilikan institusional dapat menurunkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen (Goldberg dan Idson, 1995 dalam Husnan, 2001).

Kepemilikan manajerial yang besar akan menurunkan keintegritasan laporan keuangan dan berdampak pada penurunan kinerja perusahaan. Namun kepemilikan manajerial dipandang sebagai suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

Ukuran dewan komisaris yang besar akan mempermudah monitoring manajemen dan menguntungkan perusahaan dalam pengawasan. Menurut Chtourou et al (2001) dalam Purno dan Khafid (2013) jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik.

Komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang dalam mengambil keputusan khususnya dalam hal perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Jumlah dewan direksi yang besar dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan berpengaruh positif terhadap perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pfeffer (1973) dan Pearce & Zahra (1992) dalam Faisal (2005) menyatakan bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan, karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya.

Komite audit memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen, sehingga semakin pengawasan akan semakin baik dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Utama (2012) memberikan bukti bahwa komite audit memiliki dampak positif dalam perusahaan.

Hikmah,dkk (2011) semakin besar asset, maka semakin banyak modal yang ditanamkan, semakin besar penjualan, maka semakin banyak perputaran uang dan kapitalisasi pasar. Hesti (2010) dan Uyun (2010) dalam Bukhori (2012) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Klapper dan Love (2002) dalam Purno dan Khafid (2013) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang

diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dan *Tobin's Q*. Sejalan dengan itu Darmawati, dkk (2004) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Nuswandari (2009) menemukan bukti bahwa *corporate governace* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ROE. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Amyulianthy (2012) membuktikan bahwa *corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan proksi *Tobin's Q*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan dalam beberapa penelitian dan berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan** “ (**Studi Empiris : Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011–2013**). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Purno dan Khafid, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Sampel pada penelitian terdahulu adalah kinerja perbankan, sampel penelitian sekarang adalah kinerja perusahaan manufaktur. Saya mengganti sampel penelitian ini karena perusahaan perbankan lingkupnya lebih sempit dibandingkan dengan perusahaan manufaktur yang lebih luas.

2. Menambahkan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan. Saya menambah variabel tersebut karena ukuran suatu perusahaan memperlihatkan asset yang dimiliki dan cara tata kelola perusahaan yang ukurannya besar pasti akan lebih baik.

B. Batasan Masalah

Mekanisme *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional
2. Kepemilikan manajerial
3. Ukuran dewan komisaris
4. Komisaris independen
5. Dewan direksi
6. Komite audit

Selain mekanisme *good corporate governance* terdapat variabel independen lain yaitu ukuran perusahaan. Variabel diatas adalah variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme *Good Corporate Governance*, serta ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ?
5. Apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ?
6. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang :

1. Kepemilikan institusional yang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2. Kepemilikan manajerial yang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
3. Ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
4. Komisaris independen yang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
5. Dewan direksi yang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
6. Komite audit yang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
7. Ukuran perusahaan yang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi perkembangan dunia akademik, penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan literatur bagi pihak lain yang melakukan penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan mengenai peranan *Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan yang telah banyak dilakukan sebelumnya.
2. Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai peranan dan praktik *Corporate Governance*.